

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS MASYARAKAT (PKPBM) DI KABUPATEN SAMBAS

Turasih
Pusat Studi Pembangunan Pertanian & Pedesaan IPB

Pendahuluan

Dalam rangka memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat untuk pembangunan kawasan pedesaan yang bermuara pada peningkatan kemakmuran dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan di pedesaan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM). Di dalam Permendagri tersebut mengatur tiga hal pokok, yaitu : (a) penataan ruang secara partisipatif, (b) pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa, dan (c) penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.

Fasilitasi tersebut kemudian diimplementasikan dalam bentuk kegiatan pelatihan Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) yang dilaksanakan di tingkat kabupaten pada beberapa lokasi terpilih, salah satunya adalah di Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat. Pelaksanaan pelatihan PKPBM di Kabupaten Sambas ini dilakukan selama tiga tahun berturut-turut mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2012. Pada tahap awal (tahun pertama) menggunakan pendekatan PRA (*Participatory Rural Appraisal*) yang lebih mengedepankan pemahaman masyarakat pedesaan tentang kondisi dan potensi yang mereka miliki, sehingga mereka dapat membuat rencana kegiatan dan tindak

lanjut yang harus dilakukan. Sedangkan pada tahapan lanjutan (tahun kedua) pelatihan ini lebih dititikberatkan pada pendekatan PLA (*Participatory Learning and Action*) dimana setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan dapat menentukan skala prioritas dan solusi terhadap rencana kegiatan tindak lanjut yang telah disusun sebelumnya, sehingga terbangun suatu kesamaan persepsi bersama terhadap pengelolaan sebuah kawasan perdesaan, baik bagi para peserta maupun kepada fasilitator. Pada tahun kedua ini, peserta pelatihan membuat rencana kerja tindak lanjut (RKTTL) dan juga rancangan anggaran untuk diusulkan ke Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk pengusulan dana bantuan langsung yang sifatnya stimulan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan mereka. Kemudian pada tahun ketiga dilaksanakan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dan diusulkan dievaluasi secara partisipatif di tingkat masyarakat.

Dalam perkembangannya pelaksanaan kegiatan PKPBM sangat ditentukan oleh respon dan komitmen pemerintah daerah dalam menanggapi program yang ditawarkan dari pusat. Selain itu ketika sudah terlaksana di daerah, komitmen peserta pelatihan yang berasal dari perwakilan masyarakat juga menjadi penting. Kesungguhan masyarakat dalam mengikuti pelatihan seras pemahaman merekaakan materi yang diberikan mendorong pengembangan kawasan perdesaan yang saling sinergi dan bisa memiliki posisi tawar. Termasuk di Kabupaten Sambas, kabupaten ini menjadi salah satu kabupaten terpilih di Kalimantan Barat yang menjadi lokasi PKPBM. Antusiasme masyarakat peserta pelatihan dan penerimaan yang baik oleh pemerintah daerah membuat pelaksanaan PKPBM di daerah ini berjalan hingga tahun ketiga. Kabupaten Sambas memiliki potensi dan rencana kegiatan tindak lanjut yang cukup baik untuk dibangun suatu kesamaan persepsi bersama terhadap pengembangan sebuah kawasan perdesaan berbasis masyarakat.

Makalah ini mencoba menelaah mengenai persepsi masyarakat tentang pelaksanaan pelatihan PKPBM di Kabupaten Sambas berdasarkan hasil evaluasi

kegiatan pada tahun ketiga yang dilaksanakan di tahun 2012. Penulis menjadi fasilitator pada saat pelatihan tersebut dan mengelaborasinya dalam makalah ini. Mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terkait dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan menjadi penting, selain untuk mengetahui bagaimana masyarakat menilai apa yang sudah mereka laksanakan juga perlu untuk mengetahui sejauh mana apresiasi mereka terhadap program yang terlaksana.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan, terdapat dua rumusan masalah yang dibahas dalam makalah ini yaitu:

- 1) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan PKPBM di Kabupaten Sambas?
- 2) Faktor apa yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan PKPBM di Kabupaten Sambas?

Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan PKPBM yang telah dilakukan selama tuga tahun di Kabupaten Sambas.
- 2) Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi munculnya persepsi tersebut

Metodologi

Penulisan makalah ini didukung oleh data primer hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan PKPBM di Kabupaten Sambas yang difasilitasi oleh penulis pada tahun 2012. Data primer ini diambil dengan metode partisipatif dimana peserta pelatihan dilibatkan secara langsung untuk melakukan evaluasi diri terhadap kegiatan yang telah mereka lakukan. Selain itu didukung juga dengan data sekunder dan studi literatur yang berkaitan dengan persepsi.

Tinjauan Konseptual

1. Persepsi

Menurut Rakhmat (2001), persepsi adalah pengalaman seseorang tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan, dengan kata lain persepsi memberikan makna pada stimuli inderawi. Adanya persepsi berakibat terhadap timbulnya motivasi, kemauan, tanggapan, perasaan, fantasi dari stimulus yang diterima (Lavengelt, 1996). Namun persepsi dua orang mengenai suatu obyek yang sama dapat berbeda. Hal itu terjadi karena setiap orang memiliki perbedaan kebutuhan, motif, minat, dan lain-lain. Terbentuknya persepsi cenderung menurut kebutuhan, minat, dan latar belakang masing-masing (Myers, 1988). Littlejohn (1997) menyatakan bahwa persepsi seseorang terhadap suatu objek bisa tepat, bisa keliru, dan bahkan mendua. Faktor terpenting untuk mengatasi kekeliruan persepsi adalah kemampuan untuk mendapat pengertian yang tepat tentang obyek persepsi.

Hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan, tinggi rendahnya tingkat persepsi seseorang atau kelompok akan mendasari atau mempengaruhi tingkat peran serta dalam kegiatan. Tingkat persepsi yang tinggi merupakan dasar dukungan dan motivasi positif untuk berperan serta, begitu pula tingkat persepsi yang rendah dapat merupakan penghambat bagi seseorang atau kelompok orang untuk

berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan (Susiatik, 1998). Menurut Berlo (1960) seseorang membuat sendiri keputusan-keputusan tentang apa yang akan diterima dan ditolaknya, pengalaman sebelumnya serta nilai yang dianut tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan dalam kebutuhan dan persepsinya.

Menurut Rakhmat (2001), terdapat dua faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor personal dan situasional. Faktor personal merupakan karakteristik individu dalam memberikan respon terhadap suatu stimuli. Sedangkan faktor situasional sifatnya eksternal atau sebagai penarik perhatian. Stimuli diperhatikan karena memiliki sifat yang menonjol seperti gerakan, intensitas stimuli, kebaruan, dan perulangan.

2. Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM)

Dasar pelaksanaan PKPBM adalah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2007. Diantara pasal yang membahas adalah Pasal 1 ayat 8 yang menyebutkan bahwa kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dalam Pasal 1 ayat 9 disebutkan bahwa rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat adalah hasil perencanaan pembangunan yang dilakukan bukan berdasarkan unit administratif desa, melainkan atas dasar kesamaan fungsi kawasan perdesaan. Dalam pasal 1 ayat 16 disebutkan pengertian PKPBM adalah pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat meliputi penataan ruang secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa, dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.

Pelatihan PKPBM tahun pertama bertujuan supaya terjadi kesepahaman bersama memahami pentingnya perubahan pola pikir dalam membangun desa dengan pendekatan alternatif PKPBM; meningkatkan kemampuan kapasitas aparatur desa dalam rangka implementasi pembangunan kawasan perdesaan, yang memiliki keragaman kawasan di daerah; dan meningkatkan responsibilitas aparatur desa dalam rangka menemukenali potensi kawasan melalui penataan ruang partisipatif dengan mengembangkan pusat pertumbuhan terpadu antar desa/kawasan dan mengembangkan pola kemitraan dengan peningkatan peran swasta dalam mengembangkan potensi kawasan.

Tujuan pada tahun kedua adalah untuk : 1) Meningkatkan pemahaman dan wawasan bagi Aparatur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat dalam Penataan Ruang Partisipatif, Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD) dan pengembangan kemitraan dan kelembagaan; 2) Membangun Penguatan Kapasitas Teknis Aparatur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Elemen Masyarakat di tingkat Desa yang akan berguna dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat; 3) Sebagai Bahan Evaluasi terhadap Pencapaian dari Implementasi RKTL pada Pelatihan PKPBM Tahap Pertama.

Sedangkan pada tahun ketiga tujuannya adalah: 1) Merefleksikan secara bersama-sama apa saja yang telah dilakukan komunitas warga pada masing-masing kawasan yang terbentuk; 2) Menemukenali hambatan dan tantangan yang dihadapi komunitas warga ketika merealisasikan RKTL yang telah disusun pada tahun ke-2; dan 3) Merumuskan aktivitas keberlanjutan kawasan yang telah terbentuk.

Metode pelatihan yang disajikan selama pelatihan PKPBM dilakukan berbentuk pelatihan yang menekankan dialog interaktif. Prosesnya ada dalam dua tahapan, yaitu : Tahapan pertama, pemberian materi yang kemudian didialogkan dengan kritis oleh seluruh peserta pelatihan; dan Tahapan kedua, hasil dari diskusi kritis tersebut dijadikan dasar untuk mengembangkan rencana aksi PKPBM. Teknik

pelatihan menerapkan prinsip pelatihan *participatory training* untuk mengajak dialog dan proses pembelajaran bersama. Dengan teknik dialog tersebut diarahkan dapat dicapai dua hal, yakni: 1) kesepahaman pendekatan alternatif membangun desa melalui PKPBM; dan 2) menggugah komitmen untuk mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan PKPBM di desa-desa pada satu kawasan yang sama di tempat lokasi kegiatan. Selain pemberian materi selama berlangsungnya pelatihan, juga dilakukan dialog interaktif dan permainan (*games*) yang sesuai dengan tema-tema materi pelatihan dan materi tambahan dari narasumber lokal maupun pusat.

Pembahasan

1. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan PKPBM di Kabupaten Sambas

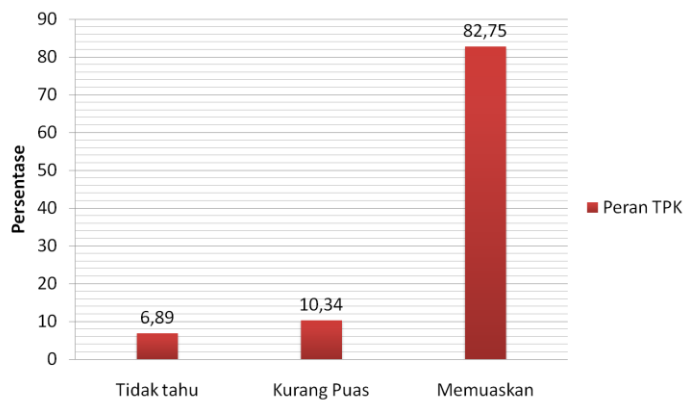
Kabupaten Sambas merupakan wilayah Kabupaten yang terletak pada bagian pantai barat paling utara dari propinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah 6.395,70 km² atau 639.570 ha (4,36% dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat). Wilayah Kabupaten Sambas yang dipilih untuk kegiatan PKPBM adalah Kecamatan Selakau Timur dengan dua desa terpilih dan Kecamatan Sebawi dengan lima desa terpilih. Pada tahun 2010 kegiatan PKPBM tahap 1 di dilaksanakan di Kabupaten Sambas kemudian kelanjutannya tahun 2011 memasuki tahap 2. Pada tahun 2012, dua tahap proses pelatihan yang dilaksanakan tersebut dievaluasi secara partisipatif dan menghasilkan beberapa informasi mengenai persepsi masyarakat terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.

Beberapa aspek yang dinilai dalam evaluasi ini adalah aspek persepsi masyarakat terhadap kinerja TPK (Tim Pengelola Kegiatan), aspek koordinasi TPK selama pelaksanaan kegiatan, aspek transparansi anggaran, aspek hambatan

dan tantangan, serta item kegiatan berdasarkan realisasi perkegiatan yang terdiri dari pembuatan peta kawasan, peningkatan kapasitas, advokasi, sosialisasi, dan operasionalisasi berdasarkan peran masyarakat dan peran satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

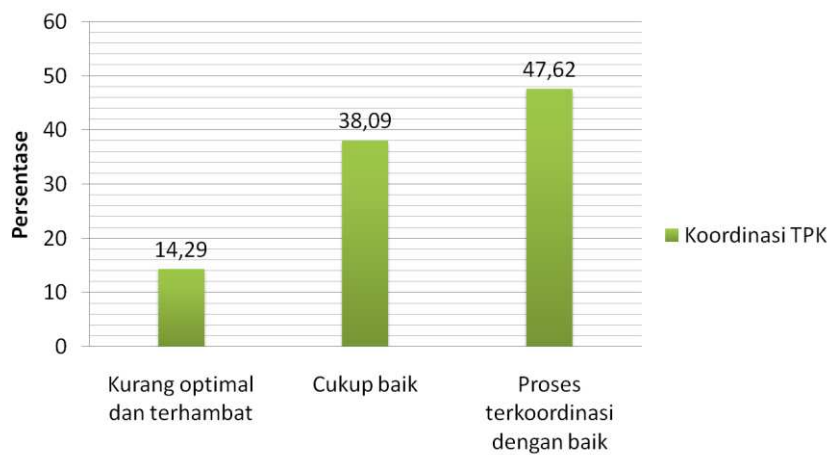
Berdasarkan penilaian masyarakat terhadap peran TPK diperoleh hasil bahwa 82,75 % masyarakat menyatakan bahwa peran TPK dalam pengelolaan kegiatan PKPBM memuaskan, 10,34% menyatakan kurang puas, dan 6,89% menyatakan tidak tahu. Secara umum kinerja TPK sudah dinilai baik oleh masyarakat, mereka yang menyatakan kurang puas adalah yang tidak terlalu bersentuhan secara langsung dengan TPK, dan yang menyatakan tidak tahu memang sebelumnya belum terdedah mengenai PKPBM (Gambar 1).

Penilaian masyarakat tentang kinerja TPK tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan PKPBM di Kabupaten Sambas dimotori secara aktif oleh TPK sebagai simpul perantara antara kebutuhan masyarakat dengan program-program yang dilaksanakan. TPK ini juga berfungsi menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan SKPD yang ada di Kabupaten Sambas. Fungsi TPK ini sedemikian vital oleh karenanya perannya dikukuhkan melalui penetapan SK Bupati atas pembentukan kawasan dan TPK.

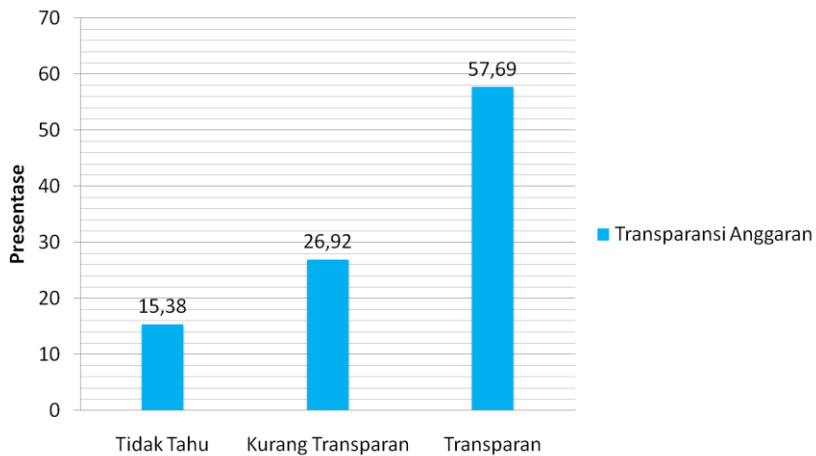


Gambar 1. Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja TPK

Penilaian mengenai kepuasan terhadap kinerja TPK tersebut selaras dengan penilaian mereka mengenai proses koordinasi yang dilakukan oleh TPK dalam mengorganisir kegiatan PKPBM di kawasan. Berdasarkan hasil penilaian 47,62% masyarakat menyatakan bahwa proses koordinasi TPK berjalan dengan baik, 38,09% menyatakan cukup baik, dan 14,29% menyatakan kurang optimal dan terhambat. Koordinasi TPK dilakukan melalui forum PKPBM yang dilaksanakan setiap bulan sekali sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat dan juga koordinasi dengan dinas terkait untuk pelaksanaan program.

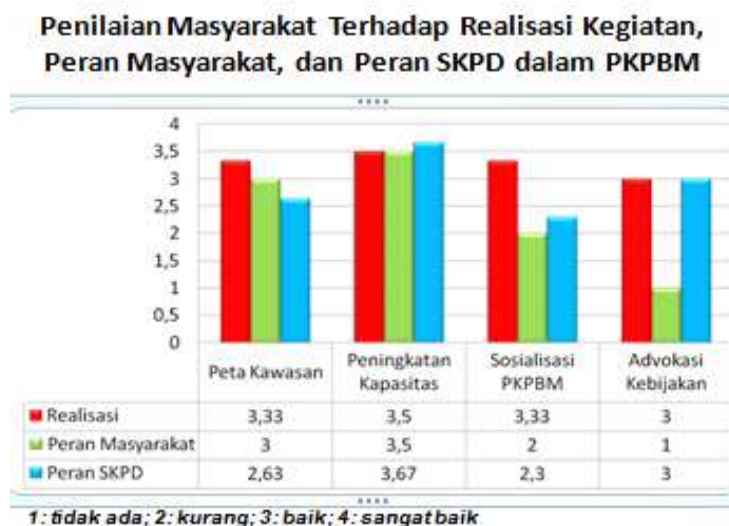


Gambar 2. Evaluasi terhadap proses koordinasi TPK



Gambar 3. Evaluasi Transparansi Penggunaan Anggaran oleh TPK

Penilaian lainnya adalah mengenai transparansi penggunaan anggaran. Melalui PKPBM, kawasan yang dikembangkan di Kabupaten Sambas mendapatkan dana stimulan sebesar Rp 75.000.000,- yang diperuntukkan guna kegiatan PKPBM berupa pembuatan peta kawasan, penguatan kapasitas, advokasi, sosialisasi, dan operasionalisasi. Berdasarkan penilaian masyarakat, penggunaan dana dinilai relatif transparan yaitu sebanyak 57,69% menyatakan bahwa TPK transparan memberikan informasi mengenai penggunaan dana, 26,92% menyatakan kurang transparan, dan sisanya 15,38 menjawab tidak tahu mengenai bagaimana TPK menggunakan dana.



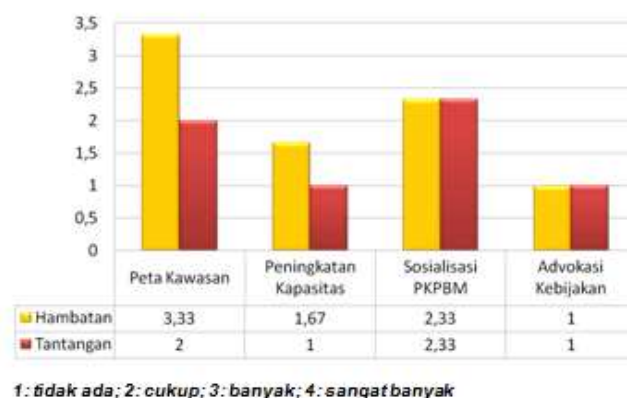
Gambar 4. Evaluasi terhadap Realisasi Kegiatan

Aspek lain yang dinilai terkait dengan pelaksanaan PKPBM di Kabupaten Sambas adalah mengenai realisasi kegiatan yang dihubungkan dengan tiga item evaluasi yaitu realisasi kegiatan, peran masyarakat, dan peran SKPD. Kegiatan PKPBM di Kabupaten Sambas dinilai sudah terlaksana dengan baik, terutama

untuk kegiatan peningkatan kapasitas, pembuatan peta kawasan, sosialisasi, dan advokasi. Kegiatan operasionalisasi tidak dimasukkan dalam aspek yang dinilai karena sifatnya internal di TPK. Peran masyarakat paling rendah dalam kegiatan advokasi, hal ini masuk akal karena advokasi lebih menitikberatkan peran TPK. Demikian juga dalam hal sosialisasi peran SKPD rendah karena lebih menekankan peran TPK dan masyarakat. Sedangkan untuk kegiatan peningkatan kapasitas, peran SKPD lebih optimal.

Dalam hal hambatan dan tantangan masyarakat menilai bahwa hambatan paling banyak adalah untuk kegiatan pembuatan peta kawasan. Hal ini disebabkan lokasi kawasan yang jaraknya relatif jauh antara satu desa dengan desa yang lain. Kondisi ini menyebabkan proses pengambilan data juga terhambat. Untuk kegiatan peningkatan kapasitas dan sosialisasi, hambatan ada tetapi sedikit. Sedangkan untuk advokasi dinilai tidak memiliki hambatan. Sedangkan tantangan, dibedakan dengan hambatan adalah sesuatu yang menghambat tetapi masih bisa diusahakan untuk diatasi, tantangan yang dihadapi untuk masing-masing kegiatan ada, tetapi sedikit. Bahkan untuk kegiatan peningkatan kapasitas dan advokasi tantangan dirasa tidak ada.

Penilaian Masyarakat tentang Hambatan dan Tantangan dalam Pelaksanaan PKPBM



Gambar 5. Evaluasi Hambatan dan Tantangan Kegiatan PKPBM

Pandangan-pandangan masyarakat mengenai beberapa aspek evaluasi kegiatan PKPBM di Kabupaten Sambas tercantum pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3. Tabel tersebut menyertakan alasan mengapa individu-individu masyarakat memberikan penilaian terhadap kinerja TPK.

Tabel 1. Alasan masyarakat dalam menilai kinerja TPK

Persepsi	Alasan
Memuaskan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran TPK selama ini cukup baik dan sangat membantu pengembangan desa 2. Peran TPK sudah cukup baik meskipun seringkali terhambat namun hambatan tersebut bukanlah persoalan utama 3. Kegiatan TPK seperti sosialisasi dan percontohan sangat membantu bagi peningkatan pengetahuan 4. Setelah ada PKPBM banyak kemajuan yang terjadi di desa dan ini tidak terlepas dari peran TPK 5. TPK selalu menyampaikan kegiatan PKPBM di kawasan (peran TPK cukup aktif) 6. TPK selalu melakukan koordinasi dan konsolidasi antar pengurus TPK 7. Setiap permasalahan di kawasan selalu dimusyawarahkan 8. TPK berperan dalam mendorong pembangunan kawasan 9. TPK dan PKBM memberikan dampak yang baik tetapi harus ditingkatkan lagi 10. TPK dan PKPBM cukup membantu dalam rencana pengembangan pedesaan 11. TPK membawa perubahan di desa-desa yang tergabung di kawasan ke arah kemajuan yang lebih baik 12. TPK selain mensosialisasikan kegiatan juga menggali potensi desa di kawasan untuk dijadikan unggulan 13. Sosialisasi sangat berperan untuk membuat masyarakat tahu tentang PKPBM
Kurang Puas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran TPK dalam PKPBM belum terlalu maksimal dan kurang memuaskan
Tidak Tahu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta baru dan belum pernah mendengar tentang PKPBM

Sumber: Data Primer (2012)

Tabel 1 tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki penilaian masing-masing terhadap kinerja TPK yang mayoritas menyatakan bahwa kinerjanya memuaskan (lihat kembali Gambar 1). Dalam menilai aspek koordinasi TPK dan transparansi anggaran juga (Gambar 2 dan Gambar 3) tidak lepas dari penilaian dan pandangan individu terhadap kinerja TPK (lihat Tabel 2 dan Tabel 3).

Tabel 2. Alasan masyarakat dalam menilai proses koordinasi TPK

Persepsi	Alasan
Koordinasi Cukup Baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran TPK dalam mengkoordinasikan kegiatan di desa sudah cukup baik 2. Dua kawasan saling mendukung kegiatan sesuai dengan RKTL yang dibuat. 3. TPK berkoordinasi dan saling mengisi kegiatan di dua kawasan tersebut 4. TPK mengkoordinasikan kegiatan kawasan melalui sosialisasi misalnya dengan mengundang masyarakat atau di tempat perkawinan
Koordinasi kurang optimal dan terhambat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi TPK kurang optimal karena jarak lokasi yang jauh 2. Kapasitas SDM di masing-masing kawasan berbeda 3. Program belum diketahui oleh masyarakat umum, karena pelatihan PKPBM hanya untuk perangkat desa dan tidak berkembang di masyarakat 4. TPK harus menguatkan tim-nya 5. Jarak yang jauh dan susah nya signal komunikasi (HP) menyebabkan sosialisasi kurang maksimal 6. Masalah kawasan belum ditentukan, apakah sebenarnya bisa satu kawasan atau tetaop dua kawasans

Sumber: Data Primer (2012)

Tabel 3. Alasan masyarakat dalam tranparansi anggaran

Persepsi	Alasan
Transparan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cukup baik dan transparan dengan penggunaan anggaran sesuai dengan pos-nya 2. Anggaran sudah digunakan sesuai dengan perencanaan 3. Setiap kegiatan yang dilakukan selalu ada SPJ yang dibuat bersama dan dikonsultasikan kepada pihak yang lebih memahami supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan 4. Penggunaan anggaran oleh TPK sudah cukup transparan hanya saja setiap pelatihan honor nya terlalu kecil dan tdk sesuai. Minmal sehari Rp 150.000 -Rp 200.000 karena jarak yang ditempuh peserta jauh. 5. Transparan karena setiap penggunaan dana selalu ada laporannya.

Kurang Transparan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana yang digunakan belum transparan 2. Kurang transparan, hanya saja setiap pertemuan selalu disediakan snack, makanan, maupun transportasi 3. Kurang transparan, karena setiap kegiatan tidak dijelaskan secara rinci tentang penggunaan anggarannya
Tidak Tahu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengetahui secara keseluruhan tentang anggaran dan biaya PKPBM 2. Kami menerima uang tunai pengganti transport dan makanan/snack saat ada pertemuan

Sumber: Data Primer (2012)

2. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kegiatan PKPBM di Kabupaten Sambas

Berdasarkan Rakhmat (2011) terdapat dua faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor personal dan faktor institusional. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan di Kabupaten Sambas, persepsi masyarakat yang terbangun terhadap pelaksanaan kegiatan PKPBM bisa dianalisa menggunakan dua faktor tersebut.

a. Faktor personal, penilaian-penilaian yang diberikan oleh individu-individu masyarakat dipengaruhi oleh latar belakang dan pengalaman individu tersebut dan partisipasinya dalam kegiatan PKPBM. Semakin individu masyarakat berpartisipasi, maka persepsi atas kegiatan PKPBM semakin positif. Sebaliknya, jawaban tidak tahu dipengaruhi oleh bagaimana dorongan individu tersebut mau berpartisipasi dalam kegiatan.

b. Faktor situasional, faktor ini terkait dengan kondisi eksternal yang mempengaruhi bagaimana individu-individu menilai kegiatan PKPBM. Semakin TPK berinteraksi dengan individu masyarakat maka persepsi atas kinerjanya semakin baik, demikian juga sebaliknya. Apabila informasi semakin disebarluaskan oleh TPK dan masyarakat semakin tahu, persepsi mereka terhadap kegiatan juga semakin positif.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada Bab III, dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan PKPBM di Kabupaten Sambas, yaitu:

1. Masyarakat menilai bahwa kinerja TPK dalam mengorganisir kegiatan PKPBM memuaskan.
2. Masyarakat menilai bahwa proses koordinasi yang dilakukan oleh TPK dalam kegiatan PKPBM dilakukan dengan baik.
3. Masyarakat menilai bahwa anggaran digunakan dengan baik dan pelaporannya transparan.
4. Pada aspek realisasi kegiatan, peran masyarakat, dan peran SKPD telah menunjukkan penilaian yang baik atau persepsi yang positif.
5. Meskipun masih merasakan ada hambatan namun secara realisasi kegiatan PKPBM di Kabupaten Sambas berjalan dengan baik.
6. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat di Kabupaten Sambas adalah faktor personal dan faktor situasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Baron, R.A, dan Byrne, D. 2004. Psikologi Sosial Jilid I (Edisi Ke-10). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Berlo, O,K. 1960. *The Process of Communication: An Introduction to Theory and Practice*. New York: Holt, Reinhart and Winston Inc.
- Lavengelt, M, J. 1996. *General of Pscology*. New York: Harper and Row Publisher.
- Littlejohn, W. 1987. *Theories of Human Communication*. California: Wardsworth Publishing Company.
- Myers, M, T. *The Dynamics of Human Communication, 5th Edition*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- PSP3 IPB, 2012, Laporan Kegiatan Tahun ke-3 PKPBM Kabupaten Sambas, Bogor: PSP3 IPB.
- Rakhmat, J. 2001. Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Susiatik, T. 1998. "Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kegiatan Pembangunan Masyarakat Desa Hutan Terpadu (PMDHT) di Desa Mojorebo, Kecamatan Wirosari Kabupaten Dati II Grobogan Jawa Tengah."
[tesis]. Bogor: Sekolah Pascasarjana IPB.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM).
<http://sambas.go.id/profile-daerah/pemerintahan/kondisi-umum.html>